

Tinjauan Mata Kuliah

Mata kuliah Administrasi Pemerintahan Daerah mengkaji hubungan kerja sama antarkomponen yang membentuk Pemerintahan Daerah dalam rangka mencapai tujuan Pemerintah Daerah. Administrasi Pemerintahan Daerah adalah alat Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuannya. Materi inti Administrasi Pemerintahan Daerah adalah kajian tentang bagaimana Pemerintah Daerah memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat Daerah.

Administrasi Pemerintahan Daerah sangat berkaitan dengan mata kuliah Pengantar Ilmu Administrasi Publik dan Sistem Administrasi Negara Indonesia. Pengantar Ilmu Administrasi Publik di antaranya membahas arti administrasi publik dan sub-sub spesies administrasi publik. Sistem Administrasi Negara Indonesia memperjelas aplikasi konsep administrasi publik dalam Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan Administrasi Pemerintahan Daerah menjelaskan aplikasi administrasi publik dalam lingkup Administrasi Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu, semua konsep yang dibahas dalam kedua mata kuliah tersebut mendasari kajian mata kuliah Administrasi Pemerintahan Daerah.

Melalui Buku Materi Pokok Administrasi Pemerintahan Daerah, Anda kami ajak mendiskusikan konsep-konsep yang mendasari pembentukan pemerintahan daerah, yaitu sentralisasi, dekonsentrasi, desentralisasi, dan tugas pembantuan. Kajian kami lanjutkan dengan membahas dasar-dasar pembentukan pemerintahan daerah di Indonesia, hubungan Pusat dan Daerah, dan sistem pemerintahan daerah menurut UUD 1945. Selanjutnya, kami bahas Kewenangan, Keuangan, Kelembagaan, Kepegawaian, dan Kebijakan Daerah. Terakhir kami bahas Pelayanan Pemerintahan Daerah serta Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah.

Setelah mendiskusikan kajian-kajian tersebut kami harap Anda dapat menjelaskan konsep dasar dan teori administrasi pemerintahan daerah dan secara konseptual dapat mengaplikasikannya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia.

Untuk mencapai tujuan tersebut kami membagi mata kuliah ini menjadi 9 modul. Kesembilan modul tersebut adalah sebagai berikut.

1. Modul pertama membahas Konsep Dasar Pemerintahan Daerah yang terdiri atas 3 kegiatan belajar, sebagai berikut.
 - a. Sentralisasi, Dekonsentrasi, Desentralisasi, dan Tugas Pembantuan.
 - b. *Local Government* dan Wilayah Administrasi.
 - c. Administrasi Pemerintahan Daerah dan Birokrasi Lokal.
2. Modul kedua membahas Pemerintahan Daerah di Indonesia yang terdiri atas 3 kegiatan belajar, sebagai berikut.
 - a. Dasar-dasar Pembentukan Pemerintahan Daerah.
 - b. Hubungan Pusat dan Daerah.
 - c. Sistem Administrasi Pemerintahan Daerah di Indonesia.
3. Modul ketiga membahas Kewenangan Pemerintah Daerah yang terdiri atas 4 kegiatan belajar, sebagai berikut.
 - a. Kewenangan Pemerintahan dan Cara Penyerahannya kepada Daerah.
 - b. Kewenangan Pemerintah Pusat.
 - c. Kewenangan Pemerintah Daerah.
 - d. Koordinasi antarPemerintahan Daerah dan Kerja sama antarPemerintah Daerah.
4. Modul keempat membahas pengelolaan Keuangan Daerah yang terdiri atas 3 kegiatan belajar, yaitu sebagai berikut.
 - a. Perencanaan Keuangan Daerah.
 - b. Pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah.
 - c. Akuntansi, Pertanggungjawaban dan Pengawasan keuangan daerah.
5. Modul kelima membahas Lembaga Pemerintahan Daerah yang terdiri atas 3 kegiatan belajar, yaitu sebagai berikut.
 - a. Kepala Daerah dan DPRD.
 - b. Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Camat, Lurah, dan Desa.
 - c. Instansi Vertikal pada Pemerintah Daerah.
6. Modul keenam membahas Kepegawaian Pemerintah Daerah yang terdiri atas 3 kegiatan belajar, yaitu sebagai berikut.
 - a. Pokok-pokok Kepegawaian.
 - b. Rekrutmen Pegawai Daerah.
 - c. Pembinaan dan Pengembangan Pegawai Daerah.
7. Modul ketujuh membahas Kebijakan Daerah yang terdiri atas 3 kegiatan belajar, yaitu sebagai berikut.
 - a. Perencanaan Kebijakan.

- b. Pelaksanaan Kebijakan.
 - c. Evaluasi Kebijakan.
8. Modul kedelapan membahas Pelayanan Pemerintahan Daerah yang terdiri atas 3 kegiatan belajar, yaitu sebagai berikut.
- a. Pelayanan Publik.
 - b. Fungsi Pemerintahan Daerah.
 - c. Kesejahteraan Masyarakat sebagai Tujuan Pelayanan Pemerintahan Daerah.
9. Modul kesembilan membahas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah yang terdiri atas 3 kegiatan belajar, yaitu sebagai berikut.
- a. Pengawasan Ekstern, Intern, dan Politik.
 - b. Pengawasan masyarakat.
 - c. Pengawasan Peradilan.

Peta Kompetensi Administrasi Pemerintahan Daerah/ADPU4440/3 sks

Anda dapat menjelaskan konsep dan administrasi Pemerintahan Daerah dan secara konseptual dapat mengaplikasikan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Indonesia

